

Judul : Jadi motor penggerak ekonomi, program 3 juta rumah ditunggu masyarakat
Tanggal : Jumat, 10 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jadi Motor Penggerak Ekonomi

Program 3 Juta Rumah Ditunggu Masyarakat

Senayem meminta Pemerintah mempercepat pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah. Sebab program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menegaskan, percepatan dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah sangat diperlukan. Sebab program ini bukan sekadar solusi atas *backlog* atau kebutuhan perumahan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

"Jika kita konsisten, target 9,6 juta rumah dalam satu periode pemerintahan sangat mungkin tercapai," kata Huda dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Program 3 Juta Rumah Wujud Nyata Pemerintah dalam Menjawab Kebutuhan Dasar Rakyat" di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau *backlog* perumahan nasional mencapai 9,9 juta unit. Artinya, hampir 10 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki hunian milik sendiri.

Huda melanjutkan, dengan tambahan 2-3 juta unit selama lima tahun, maka target perumahan bisa menembus angka 12 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan bagian dari program prioritas nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, pasar perumahan di Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan harga. Hal itu disebabkan banyak faktor, mulai harga tanah yang terus naik, kenaikan biaya material dan infrastruktur. Termasuk, inflasi dan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tinggi, serta tingginya permintaan tetapi pasokan terbatas.

"Kombinasi beberapa faktor tersebut membuat harga hunian yang layak semakin tidak terjangkau," tandasnya.

Akibatnya, terdapat lebih dari 26,6 juta warga yang tinggal di hunian tidak layak. Artinya, pembangunan 3 juta rumah

bukan hanya realistis, tapi juga sangat mendesak. "Ini peristiwa luar biasa yang harus kita dorong secara bersama-sama," ujar politikus PKB ini.

Huda mengungkapkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar mencapai 1,7 hingga 2 persen. Dalam pembangunan satu rumah bisa melibatkan 14 tenaga kerja, dan jika program berjalan maksimal, bisa menyerap lebih dari 2 juta pekerja.

Namun, Huda mengkritisi kompleksitas pembiayaan dan akses masyarakat terhadap program ini. Sehingga Pemerintah harus segera menyusun regulasi yang lebih inklusif dan menyederhanakan proses pengadaan tanah, termasuk pemanfaatan aset milik Pemerintah Pusat (Pempus), provinsi, dan kabupaten/kota.

"Standardisasi dan spesifikasi teknis masih menjadi tantangan. Perlu konektor kebijakan yang bisa digunakan lintas sektor agar program ini tidak terhambat," saran legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Huda mendesak agar Undang-Undang Perumahan segera direvisi. Tujuannya, mengidentifikasi konsumen secara lebih akurat

dan memastikan pembangunan rumah tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mendekatkan masyarakat pada pusat-pusat kerja dan layanan publik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menambahkan, penyediaan tempat tinggal dan lingkungan yang layak bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi amanat konstitusi yang menyentuh hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan setiap warga negara berhak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Rumah bukan sekadar bangunan, tapi hak asasi. Pemerintah yang berkuasa wajib mewujudkannya," ucapnya.

Zulfikar mengingatkan, niat baik dalam kebijakan perumahan harus diiringi dengan motif yang lurus dan cara yang benar. "Pengalaman mengajarkan, tujuan baik bisa rusak kalau motifnya proyek dan caranya tidak benar. Sehingga harus dipastikan kebijakan ini dijalankan dengan niat tulus untuk rakyat," tegas politikus Golkar ini.

Selain itu, ia menyoroti masalah lahan sebagai komponen

krusial dalam program 3 juta rumah. Tanah tersedia dari berbagai sumber, seperti tanah negara, BUMN, swasta, bahkan masyarakat yang bersedia mewakafkan. "Lahan itu ada. Tinggal kita pastikan statusnya *clear and clean*, dan proses pembebasannya sah," tandasnya.

Untuk itu, perlu sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan, Pemerintah Daerah (Pemda), dan sektor pembiayaan seperti perbankan untuk mempercepat realisasi program.

Sementara, Kepala Divisi Kredit Subsidi PT Bank Tabungan Negara (BTN) Dedy Lesmana mengatakan, program 3 juta rumah bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya di kalangan milenial. Dengan peningkatan kuota subsidi rumah menjadi 350 ribu unit, pihaknya telah menyalurkan 140 ribu unit rumah. "Ini berarti telah mencapai 70 persen dari target," jelasnya.

Dedy menyebut daerah dengan penyaluran perumahan subsidi terbesar berada di Jawa Barat, diikuti Sumatera, Jawa Timur, dan Sulawesi. ■ TIF